



**CRITICAL SUCCESS FAKTOR (CSF)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KERTAS KERJA POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Critical Success Factor (CSF) dari Outcome Kinerja

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah

No.	Faktor Penyebab	Kondisi yang diperlukan
1.	Belum optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah (CSF 1)

Uraian CSF Ke Kondisi Antara Sampai Kondisi paling Operasional

No.	CSF	Kondisi yang diperlukan (Antara)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah	<p>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan (CSF1.1)</p> <p>Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (CSF 1.2)</p> <p>Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (CSF 1.3)</p> <p>Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan (CSF 1.4)</p> <p>Meningkatnya ITKP (CSF 1.5)</p> <p>Meningkatnya Kualitas SAKIP SETDA (CSF 1.6)</p> <p>Meningkatnya Kualitas Layanan SETDA (CSF 1.7)</p> <p>Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah (CSF 1.8)</p> <p>Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan (CSF 1.9)</p>

No.	CSF	Kondisi yang diperlukan (Operasional)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan (CSF 1.1)	<p data-bbox="949 394 1711 427">Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan (1.1.1)</p> <p data-bbox="949 440 1832 505">Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (1.1.2)</p> <p data-bbox="949 518 1641 550">Terlaksananya Pengelolaan Adm. Kewilayahan (1.1.3)</p> <p data-bbox="949 563 1594 596">Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah (1.1.4)</p>
2.	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (CSF 1.2)	<p data-bbox="949 613 1760 646">Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spritual (2.1)</p> <p data-bbox="949 659 1798 813">Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB. (2.2)</p> <p data-bbox="949 826 1883 956">Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas. (2.3)</p>
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (CSF 1.3)	<p data-bbox="949 971 1789 1036">Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas (3.1.1)</p> <p data-bbox="949 1049 1749 1114">Terlaksananya pendokumentasian produk hukum daerah dan pengelolaan informasi hukum sesuai standar (3.1.2)</p> <p data-bbox="949 1127 1834 1192">Terlaksananya fasilitasi bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (3.1.3)</p>

No.	CSF	Kondisi yang diperlukan (Operasional)
4.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan (CSF 1.4)	<p data-bbox="981 375 1816 402">Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (1.4.1)</p> <p data-bbox="981 418 1809 479">Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (1.4.2)</p> <p data-bbox="981 495 1839 555">Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (1.4.3)</p> <p data-bbox="981 571 1827 631">Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (1.4.4)</p> <p data-bbox="981 647 1809 708">Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (1.4.5)</p> <p data-bbox="981 724 1899 820">Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (1.4.6)</p> <p data-bbox="981 862 1872 954">Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (1.4.6)</p>
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (CSF 1.5)	<p data-bbox="981 976 1603 1003">Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa (1.5.1)</p> <p data-bbox="981 1019 1731 1047">Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (1.5.2)</p> <p data-bbox="981 1063 1872 1123">Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (1.5.3)</p>
6.	Meningkatnya Nilai LAKIP Sekretariat Daerah (CSF 1.6)	<p data-bbox="981 1144 1711 1172">Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.6.1)</p> <p data-bbox="981 1188 1778 1216">Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (1.6.2)</p> <p data-bbox="981 1232 1727 1260">Tersusunnya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah (1.6.3)</p>
		<p data-bbox="981 1284 1816 1344">Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (CSF 1.6.4)</p>

No.	CSF	Kondisi yang diperlukan (Operasional)
7.	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah (CSF 1.7)	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.7.1)
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.7.2)
		Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.7.3)
		Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan pimpinan (1.7.3)
8	Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah (CSF 1.8)	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan PD (1.8.1)
		Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik dan Tata laksana (1.8.2)
		Tersusunnya Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah & Budaya Kerja BerAKHLAK RB (1.8.3)
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan (CSF 1.9)	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokoleran (1.9.1)
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (1.9.2)
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan (1.9.3)

Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan

• Penjelasan

Tata Kelola Pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh Pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, serta efisiensi dan efektif.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain A, Belum optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (a) Persentase Rata-Rata Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup SETDA

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase Rata-Rata Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup SETDA	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public.	Capaian Nilai Reformasi Birokrasi ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian perbaikan tata Kelola pemerintahan yang baik bersih dan melayani.	Capaian Nilai Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah /Jumlah unit kerja pada Sekretariat Daerah x 100	Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesra, Bagian Ekbang, Bagian PBJ, Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan keuangan, bagian Organisasi, Bagian Prokopim.

- Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan merupakan suatu upaya pemerintah ddalam mewujudkan Good Governance yang diselenggarakan melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik dari sisi kelembagaan, prosedur maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan akan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan Melayani maka misi Kabupaten Luwu Timur.menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik dapat terwujud.

1.1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

• Penjelasan

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan kondisi dimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan, Tertib dan Akuntabel.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain A. belum optimalnya pemahaman regulasi b, Belum Optimalnya Pengembangan Kapasitas sumber daya aparatur.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD Merupakan hasil evaluasi atas laporan yang disampaikan oleh pemerintah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai LPPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan capaian capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah setiap Tahun anggaran	Bagian Pemerintahan, Perangkat Daerah

Dengan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui hasil Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah setiap Tahun anggaran, maka Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan Melayani untuk menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik di Kabupaten Luwu Timur terwujud.

1.1.1. Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan

- **Penjelasan**

Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan merupakan kondisi dimana akan meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan akuntabel.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (1) Belum Optimalnya Pelaksanaan administrasi pemerintahan (Pelaporan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan)

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah Dokumen Hasil Penataan Adm. Pemerintahan

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah dokumen Hasil Penataan Adm. Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Adm. Pemerintahan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Adm. Pemerintahan ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menggambarkan pelaksanaan Pemerintahan dikecamatan dan kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Penataan Administrasi Pemerintahan yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 Tahun	Bagian Pemerintahan, Kecamatan dan Kelurahan

Dengan Terlaksananya Penataan administrasi pemerintahan dapat memberikan gambaran pelaksanaan penataan pemerintahan khususnya kecamatan dan kelurahan dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan administrasi pemerintahan selanjutnya sehingga akan meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah.

1.1.2. Terlaksannya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

• Penjelasan

Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan kondisi dimana tersedianya dokumen yang menggambarkan pelaksanaan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) belum optimalnya penyajian data dari perangkat daerah

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah yang disusun dan ditetapkan menjadi indikator kinerja yang dapat diukur.	Dokumen hasil fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Otonomi daerah di kabupaten	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun	Bagian Pemerintahan, Perangkat Daerah

Dengan terlaksananya fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah akan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan kinerja sehingga akan meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah.

1.1.3. Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

- **Penjelasan**

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi kewilayahan merupakan kondisi dimana tertib administrasi kewilayahan dan memberikan kepastian hukum terhadap suatu wilayah

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) belum tertibnya administrasi batas wilayah kecamatan, desa/kelurahan.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kewilayahan

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Dokumen Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kewilayahan merupakan suatu batas administrasi wilayah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan oleh para pihak yang berbatasan yang dihasilkan dan ditetapkan menjadi indikator kinerja yang dapat diukur.	Dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi bagi pemangku kepentingan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun	Bagian Pemerintahan

Dengan terlaksananya pengelolaan administrasi kewilayahan dapat memberikan kepastian hukum terhadap suatu wilayah administrasi pemerintahan sehingga akan meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah..

1.1.4. Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah

- **Penjelasan**

Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah merupakan kondisi dimana terlaksananya Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) Belum optimalnya tim Kerjasama daerah (b) belum optimalnya koordinasi Perangkat Daerah pemrakarsa kerjasama

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah dokumen Kerjasama Daerah

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah	dokumen Kerjasama Daerah merupakan hasil Fasilitasi Kerjasama daerah berdasarkan kesepakatan oleh para pihak dan ditetapkan menjadi indikator kinerja yang dapat diukur.	dokumen Kerjasama Daerah Menggambarkan hasil pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun	Bagian Pemerintahan, OPD Pemrakarsa dan Stakeholder terkait

Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga akan meningkatkan kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah.

1.2. Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- **Penjelasan**

Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat merupakan kondisi dimana akan meningkatkan pencapaian kinerja perangkat daerah Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) belum optimalnya penerapan regulasi

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) % Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan sesuai ketentuan	Kebijakan Kesejahteraan rakyat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Kebijakan Kesejahteraan rakyat ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menggambarkan pelaksanaan capaian kinerja bagian kesejahteraan rakyat	Jumlah Kebijakan yang difasilitasi/ Jumlah target kebijakan yang difasilitasi x 100	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat akan berpengaruh pada capaian kinerja bagian kesejahteraan rakyat dalam pelayanan kepada Masyarakat sesuai kebijakan yang berlaku untuk peningkatan kualitas dan capaian kinerja Penyelenggaraan urusan Sekretariat Daerah.

1.2.1. Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spritual

- **Penjelasan**

Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual merupakan kondisi pelaksanaan kegiatan keagamaan yang difasilitasi

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) Kurang pemahamnya Masyarakat tentang hibah

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menggambarkan pelaksanaan capaian kinerja bagian kesejahteraan rakyat	Dokumen yang dihasilkan sesuai dengan hasil Fasilitasi Bina Mental Spritual	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual akan berpengaruh terhadap capaian kinerja kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pemberian hibah kepada Lembaga dan Rumah Ibadah untuk peningkatan kualitas dan capaian kinerja bagian kesejahteraan Rakyat.

1.2.2. Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

- **Penjelasan**

Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa kurang mampu dan monitoring evaluasi kegiatan kesejahteraan

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) belum optimalnya kegiatan sosialisasi (b) Informasi belum tepat sasaran

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah Dokumen Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Dokumen Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen Kebijakan, Evaluasi dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Dokumen Kebijakan, Evaluasi dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menggambarkan pelaksanaan capaian kinerja bagian kesejahteraan rakyat	Dokumen Kebijakan, Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 1 tahun	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial akan berpengaruh pada peningkatan akses dan pemerataan kesempatan belajar bagi mahasiswa kurang mampu diperguruan tinggi sehingga program pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui sektor Pendidikan yang lebih tinggi dapat terwujud.

1.2.3. Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

- **Penjelasan**

Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat merupakan kondisi dimana pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa berprestasi dan Usaha Kesehatan sekolah/Madrasah

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) belum optimalnya kegiatan sosialisasi (b) Informasi belum tepat sasaran

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen Kebijakan, Evaluasi dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Dokumen Kebijakan, Evaluasi dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menggambarkan pelaksanaan capaian kinerja bagian kesejahteraan rakyat	Dokumen Kebijakan, Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 1 tahun	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat untuk memotivasi mahasiswa agar dapat meraih prestasi yang lebih tinggi pada perguruan tinggi sehingga program pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui sektor Pendidikan yang lebih tinggi dapat terwujud

1.3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi hukum

• **Penjelasan**

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi hukum merupakan kondisi dimana pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum terlaksana sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain: Tingkat koordinasi dalam harmonisasi rancangan produk hukum daerah belum optimal, Kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan masih rendah, Belum dilaksanakannya analisis dan evaluasi regulasi produk hukum daerah, dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional yang terdiri dari 4 variabel: 1. Tingkat koordinasi harmonisasi; 2. Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan; 3. Kualitas Re-regulasi atau deregulasi; dan 4. Pengelolaan JDIH.	Indeks Reformasi Hukum (IRH) ditetapkan sebagai indikator kinerja Bagian Hukum untuk mendukung penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan capaian kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Hukum-yang dikeluarkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI setiap tahun	Bagian Hukum

Dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi hukum akan meningkatkan Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH). Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) akan berpengaruh terhadap Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Luwu Timur.

1.3.1. Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas

- **Penjelasan**

Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas merupakan kondisi dimana penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain: masih ada penyusunan produk hukum daerah tidak diselesaikan tepat waktu sebagai akibat kurangnya ASN yang menangani penyusunan produk hukum daerah, masih sering ditemukan *typo* (salah ketik), dan kurangnya keterlibatan Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi penyusunan produk hukum daerah

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (a) Jumlah produk hukum daerah yang disusun

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah produk hukum daerah yang disusun (Dokumen)	Jumlah produk hukum daerah yang disusun adalah jumlah rancangan produk hukum daerah yang telah difasilitasi Bagian Hukum melalui proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi sampai selesainya proses penetapan rancangan produk hukum daerah menjadi produk hukum daerah. (sesuai indikator dalam Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Jumlah produk hukum daerah yang disusun menggambarkan suatu keberhasilan bahwa seluruh produk hukum daerah yang disusun sampai penetapan telah difasilitasi sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga capaiannya akan relevan dengan Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Jumlah produk hukum daerah yang disusun selama 1 Tahun	Bagian Hukum

Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas akan berpengaruh terhadap peningkatan Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang dinilai oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI setiap tahun.

1.3.2. Terlaksananya pendokumentasian produk hukum daerah dan pengelolaan informasi hukum sesuai standar

• Penjelasan

Terlaksananya pendokumentasian produk hukum daerah dan pengelolaan informasi hukum sesuai standar merupakan kondisi dimana kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) telah terintegrasi dengan JDIH Nasional dan dikelola sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain: ketersediaan produk hukum daerah dalam JDIH belum lengkap, ASN Pengelola JDIH hanya 1 (satu) orang, produk hukum daerah yang diunggah ke dalam JDIH belum dilengkapi abstrak.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (a) Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi (Dokumen)	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi adalah jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan telah didokumentasi sesuai Standar dan telah disebarluaskan melalui penempatan pada Lembaran Daerah atau Berita Daerah serta telah diunggah ke dalam JDIH (indikator sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan standar pengelolaan JDIH merupakan salah satu variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) sehingga relevan menggambarkan kondisi. Kinerja pengelolaan JDIH dievaluasi oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan menetapkan hasil penilaian melalui Keputusan Menkumham.	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi setiap 1 (satu) tahun	Bagian Hukum

Terlaksananya pendokumentasian produk hukum daerah dan pengelolaan informasi hukum sesuai standar akan meningkatkan Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang dinilai oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI setiap tahun.

1.3.3. Terlaksananya fasilitasi bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- **Penjelasan**

Terlaksananya fasilitasi bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan kondisi dimana gugatan hukum/perkara hukum atau permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur atau Aparaturnya (litigasi dan/atau non-litigasi) dapat diadvokasi, tertangani dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme atau hukum acara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) belum optimalnya penanganan kasus hukum sebagai akibat minimnya kompetensi ASN yang mendampingi, belum optimalnya koordinasi bantuan hukum.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum (kasus)	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum adalah jumlah gugatan/perkara hukum atau permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah daerah atau aparaturnya telah diadvokasi, tertangani dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme atau hukum acara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (indikator sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum tidak secara langsung mempengaruhi penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), namun dengan adanya permasalahan hukum tentu akan dilakukan analisis dan evaluasi terhadap regulasi daerah terkait permasalahan hukum yang dihadapi melalui re-regulasi atau deregulasi. Re-regulasi atau deregulasi merupakan variabel penilaian IRH	Jumlah Kasus (gugatan/perkara hukum/permasalahan hukum) yang telah diadvokasi, tertangani dan ditindaklanjuti selama 1 Tahun	Bagian Hukum

Terlaksananya fasilitasi bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan meningkatkan kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah.

1.4. Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi Perekonomian dan administrasi Pembangunan

• Penjelasan

Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi Perekonomian dan administrasi Pembangunan merupakan kondisi dimana akan meningkatkan perekonomian dan Pembangunan daerah. Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain, (a) Harga bahan pokok yang fluktuatif (b) Belum optimalnya pengembangan potensi daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Persentase Pengendalian Inflasi daerah (2) Persentase Kebijakan perekonomian dan administrasi Pembangunan yang dilaksanakan

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Tingkat Pengendalian Inflasi	Pengendalian Inflasi Daerah merupakan suatu upaya untuk mengendalikan kondisi kenaikan harga bahan pokok secara menyeluruh	Tingkat Pengendalian Inflasi daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja Bagian perekonomian dan administrasi Pembangunan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	Nilai Inflasi Daerah	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Persentase Kebijakan perekonomian dan administrasi Pembangunan yang dilaksanakan	Kebijakan perekonomian dan administrasi Pembangunan merupakan strategi dan Tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Pembangunan di daerah	Persentase Kebijakan perekonomian dan administrasi Pembangunan yang dilaksanakan ditetapkan sebagai indikator dalam mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah	Capaian kebijakan perekonomian dan adm. Pembangunan yang dihasilkan/ target Kebijakan perekonomian dan adm. Pembangunan selama 1 (satu) Tahun x 100	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi Perekonomian dan administrasi Pembangunan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan Pembangunan di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

1.4.1. Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

• **Penjelasan**

Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian merupakan kondisi dalam melakukan pengendalian inflasi Daerah melalui tim pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain, (a) Belum Optimalnya TPID dalam melakukan pengendalian Inflasi Daerah

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan Hasil Pengendalian dan distribusi perekonomian merupakan Gambaran hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian ditetapkan sebagai indikator kinerja dalam mendukung Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian selama 1 (satu) tahun	Bagian Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan

Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang baik akan berpengaruh terhadap pengendalian Inflasi daerah sehingga akan meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan Sekretraiat Daerah.

1.4.2. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

• Penjelasan

Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD merupakan kondisi dimana fasilitasi dan pembinaan

BUMD dan BLUD

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) masih kurangnya pengembangan kompetensi ASN dalam melakukan pembinaan BUMD dan BLUD

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen Hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang difasilitasi penyusunannya. Hal ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen yang dihasilkan pada pelaksanaan fasilitasi koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitasi dibidang perekonomian.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Dan yang difasilitasi Penyusunannya selama 1 Tahun	Bagian Ekbang

Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang baik, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitasi dibidang perekonomian guna peningkatan pendapatan asli daerah sehingga akan meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan Sekretraiat Daerah.

1.4.3. Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

- **Penjelasan**

Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil merupakan pelaksanaan kegiatan fasilitasi percepatan akses keuangan daerah melalui tim percepatan Akses keuangan Daerah

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) Belum optimalnya TPAKD dalam memfasilitasi UMKM dalam memperoleh akses KUR

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. Hal ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil , yang akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitasi dibidang perekonomian.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil selama 1 Tahun	Bagian Ekbang

Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang baik, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitasi dibidang perekonomian guna peningkatan UMKM dalam memperoleh akses keuangan dari perbankan sehingga akan meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Sekretariat Daerah.

1.4.4. Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

- **Penjelasan**

Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan merupakan kondisi dimana dilakukan pengendalian terhadap daya serap Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) Belum optimalnya Realisasi Anggaran APBD

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator(1) Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan Hasil Pengendalian dan evaluasi program. Hal ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan terhadap peningkatan realisasi APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan selama 1 Tahun	Bagian Ekbang, BKAD

Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan akan berpengaruh pada peningkatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selanjutnya menjadi bahan pelaporan ke Tingkat propinsi pada biro Pembangunan sehingga akan meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.4.5. Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

- **Penjelasan**

Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan merupakan kondisi dimana dilakukan Monitoring dan Pelaporan pelaksanaan Pembangunan kegiatan fisik.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) Belum optimalnya Pelaporan Kegiatan Pembangunan Fisik

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indicator(1) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan Hasil Pengelolaan evaluasi kegiatan realisasi fisik dan keuangan. Hal ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Realisasi Pembangunan Fisik dan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan selama 1 Tahun	Bagian Ekbang Perangkat Daerah Pelaksana Kegiatan Fisik

Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan merupakan kondisi dimana dilakukan monitoring terhadap kegiatan Pembangunan fisik dan selanjutnya dilakukan evaluasi dari hasil monitoring apakah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh OPD masing – masing.

1.4.6. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja

- **Penjelasan**

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja merupakan kondisi dimana dilakukan fasilitasi kegiatan Pelaksanaan Pelaporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT)

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indicator(1) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Hal ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menggambarkan pencapaian kinerja bagian perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, selama 1 Tahun	Bagian Ekbang, Dinkes, Satpol PP, Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja akan berpengaruh pada percepatan Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk peningkatan sosialisasi pencegahan peredaran rokok ilegal, pelatihan tenaga kerja dan pembayaran jaminan Kesehatan

1.4.7. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian

• **Penjelasan**

Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain masih kurangnya pengembangan kompetensi ASN dan jumlah sumber daya manusia

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian yang difasilitasi penyusunannya. Hal ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen yang dihasilkan pada pelaksanaan fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian yang akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitasi dibidang sumber daya alam.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian yang dihasilkan selama 1 Tahun	Bagian Ekbang

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian yang baik, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitasi dibidang sumber daya alam guna peningkatan pendapatan asli daerah sehingga akan meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan Sekretariat Daerah.

1.5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- Penjelasan

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan kondisi dimana tercapainya suatu indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam Tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi pengadaan.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) masih kurangnya Sumber Daya Manusia (B) Masih lemahnya sistem pemanfaatan pengadaan

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai indeks tata Kelola pengadaan merupakan suatu indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam Tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi pengadaan.	Nilai indeks tata Kelola pengadaan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena merupakan Bagian dari Penilaian dari Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Tata kelola Pengadaan selama 1 Tahun	Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Dengan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa akan memberikan dampak terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di daerah sesuai dengan tujuannya yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yg dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia sehingga dapat meningkatkan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas, tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang- undangan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja dan memaksimalkan tata Kelola pengadaan barang dan jasa di daerah.

1.5.1. Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa

- **Penjelasan**

Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa merupakan suatu Upaya untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia baik melalui tender, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan e-Purchasing atau pembelian melalui e- katalog.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) Belum maksimalnya proses pemilihan (B) Belum terlaksananya proses pemilihan penyedia berdasarkan target waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana umum pengadaan (RUP).

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (a) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa Merupakan Laporan Hasil Proses Pemilihan penyedia yang disampaikan secara berkala	Tersedianya Dokumen hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa sebagai bahan laporan yang disampaikan secara berkala.	Dokumen Hasil Pengelolaan Barang dan Jasa dalam kurun 1 Tahun	Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Dengan terlaksananya pengelolaan barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku akan menghasilkan Penyedia yang kompeten dalam rangka mewujudkan percepatan Pembangunan di daerah

1.5.2. Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- **Penjelasan**

Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik merupakan suatu Upaya untuk menyediakan sarana dukungan pengadaan secara e-procurement.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) Belum terpenuhinya sumberdaya manusia pengelola pengadaan secara Elektronik.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Secara Elektronik

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen Pengelolaan Pengadaan secara elektronik Merupakan Laporan hasil pemanfaatan penggunaan aplikasi dalam rangka mendukung pengadaan barang dan jasa secara elektronik.	Tersedianya Dokumen hasil Pengelolaan Pengadaan secara elektronik sebagai bahan laporan yang disampaikan secara berkala.	Dokumen Hasil Pengelolaan secara elektronik dalam kurun 1 Tahun	Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Dengan terlaksananya pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik akan menghasilkan system pengadaan barang dan jasa efektif, efisien dan transparan.

1.5.3. Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

- **Penjelasan**

Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa merupakan suatu Upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN sebagai pelaku pengadaan

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) Belum maksimalnya sumberdaya manusia ASN sebagai pelaku pengadaan

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (a) Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, maupun konsultasi pengadaan barang dan jasa. ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap relevan dan terukur.	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menggambarkan capaian Peningkatan kompetensi ASN dibidang pengadaan barang dan jasa	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, maupun konsultasi pengadaan barang dan jasa. Dalam 1 Tahun	Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Dengan terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa akan meningkatkan pemahaman ASN sebagai pelaku pengadaan terhadap ketentuan dan regulasi dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1.6. Meningkatnya kualitas SAKIP Sekretariat Daerah

• Penjelasan

Meningkatkannya Kualitas SAKIP Sekretariat daerah merupakan kondisi dimana Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a), Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai Sakip Sekretariat Daerah Merupakan hasil Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang terdiri dari 4 Komponen yakni 1. Perencanaan kinerja dgn Bobot 30; 2. Pengukuran Kinerja dgn Bobot 30; 3. Pelaporan Kinerja dgn Bobot 15; 4. Evaluasi AKIP dgn Bobot 25.	Nilai Sakip Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja Bagian perencanaan dan keuangan untuk mendukung penilaian SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Sekretariat Daerah yang dikeluarkan oleh tim evaluator dari Inspektorat Kabupaten.	Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Prokopim

Dengan Meningkatnya kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah akan meningkatkan Nilai SAKIP Sekretariat Daerah yang meliputi Penilaian kualitas perencanaan, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil untuk mendukung penilaian SAKIP Pemerintah Daerah.

1.6.1. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- **Penjelasan**

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan kondisi dimana evaluasi kinerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) Belum Optimalnya Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menggambarkan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 Tahun	Bagian Lingkup Sekretariat Daerah

Dengan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat memberikan gambaran capaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan nilai SAKIP Sekretariat Daerah sehingga akan meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah.

1.6.2. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

• Penjelasan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen memuat rencana kerja yang memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat daerah Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) Pemahaman aparatur tentang perencanaan pembangunan daerah belum merata Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci dalam pelayanan kepada masyarakat agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam kurun waktu tertentu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator dalam mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat daerah,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Bgaian Perencanaan dan Keuangan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kewenangan, Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah..

1.6.3. Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah

- **Penjelasan**

Tersusunnya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah merupakan ringkasan informasi keuangan yang disajikan secara sistematis dan terstruktur, yang mencerminkan hasil operasi, posisi keuangan, dan arus kas suatu entitas dalam periode tertentu yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) Pemahaman aparaturnya tentang perencanaan pembangunan daerah belum merata

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Perangkat Daerah merupakan ringkasan informasi keuangan yang disajikan secara sistematis dan terstruktur, yang mencerminkan hasil operasi, posisi dalam periode tertentu	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja dalam mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah akan berpengaruh terhadap informasi keuangan yang disajikan secara sistematis dan terstruktur, yang mencerminkan hasil operasi, posisi dalam periode tertentu dalam mendukung Pencapaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

1.6.4. Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- **Penjelasan**

Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah merupakan kondisi dimana dilaksanakannya pendataan barang milik daerah pada Perangkat Daerah Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) Belum optimalnya pendataan Barang Milik Daerah Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah merupakan informasi penyajian data Barang Milik Daerah yang disajikan secara sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Jumlah Laporan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja dalam mendukung pencapaian kinerja dalam pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Bgaian Perencanaan dan Keuangan

Tersusunnya Laporan adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja dalam pengelolaan Barang Milik Daerah dalam mendukung Pencapaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.7. Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah

• Penjelasan

Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah merupakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan layanan administrasi kepegawaian, penyediaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah serta Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan. sehingga pelaksanaan urusan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) Kualitas Pelayanan yang belum Optimal

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Persentase layanan Administrasi Perkantoran yang memadai (2) Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

(3) Persentase Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Pimpinan

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase layanan Administrasi Perkantoran yang memadai	Layanan administrasi perkantoran merupakan suatu Tindakan dalam penanganan urusan kepegawaian, Jasa Komunikasi dan Jasa Pelayanan Umum	Persentase layanan Administrasi Perkantoran yang memadai ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menggambarkan capaian Peningkatan Kinerja Sekretariat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan/Jumlah Layanan yang ditetapkan x 100	Bagian Umum
Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	Barang Milik Daerah merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyediaan dan pemeliharaan barang milik daerah untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan wewenang dalam mencapai tujuan organisasi.	Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan organisasi	Jumlah Realisasi Pengadaan dan Pemeliharaan BMD yang dilaksanakan/Jumlah BMD yang diadakan dalam dipelihara x 100	Bagian Umum
Persentase Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Pimpinan	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyediaan pemenuhan kebutuhan rumah tangga pimpinan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pimpinan	Persentase Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Pimpinan ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas dan wewenang.	Jumlah Kebutuhan Rumah tangga Pimpinan yang dilaksanakan / Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan x 100	Bagian Umum

Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah maka pelaksanaan tugas dan wewenang dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)

1.7.1. Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- **Penjelasan**

Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan administrasi umum untuk menunjang kinerja dan aktivitas perkantoran secara efisien sehingga aparatur dapat melaksanakan kerjanya secara optimal.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) masih kurangnya Sumber Daya Manusia (B) Masih kurangnya Sarana dan Prasarana

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Tersedia

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Tersedia	Dokumen Administrasi umum yang tersedia merupakan hasil pelaksanaan aktivitas dan penatausahaan pengendalian dan pengorganisasian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam mendukung urusan Sekretariat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Tersedia ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menggambarkan capaian Peningkatan Kinerja Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Tersedia dalam kurun Waktu 1 (satu) Tahun	Bagian Umum

Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang menunjang pelayanan dalam peningkatan aktivitas perkantoran dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah

1.7.2. Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

• Penjelasan

Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah merupakan rekaman kegiatan yang dilakukan oleh seorang pegawai selama bekerja disuatu instansi yang dapat digunakan sebagai alat bantu pengambil Keputusan oleh pimpinan terkait sebagai bukti perjalanan karir pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) Kurangnya Informasi data kepegawaian (B) Masih kurangnya sumber daya manusia

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) . Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Dokumen Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah merupakan rekaman kegiatan yang dilakukan oleh seorang pegawai selama bekerja disuatu instansi yang dapat digunakan sebagai alat bantu pengambil Keputusan oleh pimpinan terkait sebagai bukti perjalanan karir pegawai dan sebagai sumber informasi yang outentik dalam pengelolaan dokumen kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku.	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menggambarkan capaian Peningkatan pelayanan kepegawaian sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun	Bagian Umum

Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah sangat berpengaruh terhadap pimpinan dalam mengambil keputusan sebagai bukti perjalanan karir pegawai dan sebagai sumber informasi yang outentik dalam pengelolaan dokumen kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

1.7.3. Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

• Penjelasan

Terlaksananya pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan suatu kondisi dimana tersedia dan terpeliharanya BMD dalam menunjang operasional pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) Belum maksimalnya pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan menunjang Operasional jalannya pemerintahan Daerah serta pelayanan kepada Masyarakat.	Jumlah Pengadaandan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menggambarkan capaian tata Kelola BMD yang efektif dan Efisien	Jumlah Pengadaandan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kurun waktu 1 Tahun	Bagian Umum

Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah akan berpengaruh terhadap Peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

1.7.4. Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan Pimpinan

- **Penjelasan**

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan rumah tangga pimpinan merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyediaan pemenuhan kebutuhan rumah tangga pimpinan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pimpinan

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) Belum Optimalnya layanan kerumahtanggaan (b) Kurangnya Sumber Daya Manusia Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan	Paket Kebutuhan rumah tangga pimpinan merupakan hasil dari pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah tangga Pimpinan ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menggambarkan seluruh kegiatan yang disediakan untuk kepentingan Pimpinan	Jumlah Paket Kebutuhan PRumah Tangga Pimpinan yang dilaksanakan dalam kurun 1 (satu) Tahun	Bagian Umum

Terlaksananya pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.8 Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah

• Penjelasan

1. Penataan Organisasi merupakan kondisi upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
2. Organisasi yang tidak tepat fungsi dan tepat ukuran mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja yang berdampak pada pelayanan publik yang tidak optimal

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Nilai Bobot Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai pada komponen ini merupakan hasil pencapaian kinerja pemerintah daerah setiap akhir tahun berdasarkan perjanjian kinerja yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah kinerja (LAKIP)	Nilai pada komponen ini merupakan hasil pencapaian kinerja pemerintah daerah setiap akhir tahun berdasarkan perjanjian kinerja yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah kinerja (LAKIP) yang berisi gambaran secara menyeluruh tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terhadap pengukuran hasil capaian kinerja yang dilengkapi dengan uraian penjelasan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian berdasarkan indikator kinerja, formulasi dengan penggunaan anggaran mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi output dan outcome.	Skor Penyederhanaan Struktur Organisasi	Kementerian Dalam Negeri
Persentase Implementasi RB General dan RB Tematik	Persentase Implementasi RB General dan RB Tematik Merupakan gambaran capaian implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah setiap tahunnya dalam upaya pemerintah untuk mencapai good governance	Merupakan gambaran capaian implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah setiap tahunnya dalam upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing untuk pelayanan publik yang lebih baik.	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kementerian PANRB

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai Evaluasi Kelembagaan Merupakan hasil dari proses evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan terhadap suatu organisasi.	Merupakan hasil dari proses evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan terhadap suatu organisasi yang menjadi dasar untuk menata organisasi, meningkatkan efisiensi dan menciptakan kelembagaan yang efektif	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kementerian PANRB
Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik terhadap penyelenggara pelayanan publik yang langsung kemasyarakat	Indeks Pelayanan Publik merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik terhadap penyelenggara pelayanan publik yang langsung kemasyarakat yang selanjutnya dari hasil tersebut menjadi pedoman/tolak ukur mengevaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan yang berkualitas	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kementerian PANRB
Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengidentifikasi kompetensi penyelenggara pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan dan pengaduan yang memenuhi asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan dan akuntabilitas	Nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengidentifikasi kompetensi penyelenggara pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan dan pengaduan yang memenuhi asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan dan akuntabilitas	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kementerian PANRB
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Merupakan hasil penilaian untuk mengetahui tingkat implemenfasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Merupakan hasil penilaian untuk mengetahui tingkat implemenfasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil perangkat daerah secara internal	Laporan hasil Evaluasi AKIP Internal	Inspektorat Kabupaten

Dengan melakukan penataan organisasi akan mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang tidak tumpang tindih menghasilkan kinerja yang lebih baik, dan pelayanan publik yang lebih optimal.

1.8.1. Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

- **Penjelasan**

Terlaksananya pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan merupakan kondisi melakukan perbaikan perencanaan dan analisis terhadap aspek yang diperlukan dalam menggerakkan suatu organisasi yang meliputi sumber daya manusia dan fasilitas yang dibutuhkan secara proporsional .

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisi Jabatan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan merupakan analisis terhadap kajian organisasi untuk mengetahui kebutuhan model suatu organisasi dan kebutuhan SDM sebagai penggerak organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang didukung dengan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi	Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisi Jabatan dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian penguatan organisasi	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan Anjab yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Bidang kelembagaan dan Analisis jabatan

Dengan dilaksanakannya pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan setiap saat sesuai kebutuhan, semakin meningkatkan penguatan organisasi melalui sumber daya manusia yang berkompetensi dan profesional sehingga dapat menjadikan organisasi tidak tumpang tindih.

1.8.2. Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik dan Tatalaksana

• Penjelasan

Terlaksananya fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana merupakan kondisi dimana akan memudahkan proses pemberian pelayanan melalui standar operasional prosedur yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan publik yang cepat dan efisien.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah PD yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Jumlah PD yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik merupakan kondisi dimana unit kerja penyelenggara pelayanan publik yang langsung memberikan pelayanan ke masyarakat terus melakukan perubahan dan perbaikan pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan pelayanan .	Jumlah PD yang dibina untuk peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan capaian suatu organisasi yang berorientasi pelayanan.	Jumlah PD yang dilakukann pembinaan Pelayanan Publik	Bidang Pelayanan Publik dan Tatalaksana
Jumlah Dokumen Ketatalaksanaan yang sesuai regulasi	Dokumen Ketatalaksanaan yang sesuai regulasi Merupakan kondisi dimana setiap proses yang dilakukan berpedoman standar operasional prosedur yang telah ditetapkan	Jumlah Dokumen Ketatalaksanaan yang sesuai regulasi sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan kualitas standar pelayanann yang diberikan kepada penerima manfaat	Jumlah Dokumen ketatalaksanaan yang dihasilkan	Bidang Pelayanan Publik dan Tatalaksana

Dengan Terlaksananya fasilitasi pembinaan pelayanan Publik dan tatalaksana akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan organisasi yang lebih lincah dengan meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan melalui standar pelayanan yang optimal.

1.8.3. Tersusunnya Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah dan Budaya Kerja BerAKHLAK RB

- **Penjelasan**

Tersusunnya pelaporan kinerja perangkat daerah menggambarkan kondisi capaian kinerja perangkat daerah secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kinerja sampai dengan faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target, yang akan menjadi acuan untuk perbaikan dan penyempurnaan target kinerja berikutnya.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah PD yang dibina dalam rangka penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK RB	Budaya kerja BerAKHLAK merupakan kondisi organisasi yang menerapkan/internalisasi prinsip-prinsip budaya kerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Jumlah PD yang dibina dalam rangka penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK RB ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan capaian keberhasilan suatu organisasi yang transparan.	Jumlah PD yang dibina	Bidang Reformasi Birokrasi dan Kinerja
Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Laporan kinerja perangkat daerah adalah ikhtiar yang menggambarkan secara ringkas dan lengkap tentang capaian akuntabilitas kinerja PD yang disusun berdasarkan rencana dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan.	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan capaian keberhasilan suatu organisasi perangkat daerah yang akuntabel.	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Bidang Reformasi Birokrasi dan Kinerja

Dengan Tersusunnya laporan kinerja perangkat daerah akan berpengaruh terhadap upaya-upaya perbaikan atas kelemahan ataupun kegagalan atas permasalahan yang dihadapi organisasi sehingga akan dapat meningkatkan capaian kinerja tahun berikutnya dengan menjadikan laporan kinerja tahun sebelumnya menjadi acuan perbaikan kinerja tahun selanjutnya..

1.9. Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan

- **Penjelasan**

Meningkatnya kualitas layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan merupakan kondisi dimana terselenggaranya kegiatan perencanaan, pengaturan, pengoordinasian dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan dibidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain A. Belum Optimalnya Pengembangan Kapasitas sumber daya aparatur., B. Belum optimalnya sarana dan prasarana

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Persentase Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Terpenuhi

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Terpenuhi	Persentase Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Terpenuhi merupakan kegiatan perencanaan, pengaturan, dan pengoordinasian terkait kegiatan kunjungan kerja ataupun kegiatan seremonial yang dihadiri oeh Pimpinan daerah	Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Terpenuhi dijadikan indikator kinerja karena merupakan dasar pengukuran yang menggambarkan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan daerah	Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang terlaksana /jumlah permintaan kegiatan Pimpinan Daerah x 100	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Dengan meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan maka pelaksanaan kegiatan pimpinan dapat terlaksana dengan baik yang akan mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.9.1. Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan

- **Penjelasan**

Terlaksananya pengaturan kegiatan Pimpinan Daerah berdasarkan aturan keprotokolan.

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (1) Belum Optimalnya pengembangan sumberdaya aparatur (2) Belum Optimalnya sarana dan prasarana

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan yang merupakan gambaran pelaksanaan pengaturan kegiatan Pimpinan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan yang ditetapkan sebagai indikator kinerja merupakan dasar pengukuran yang dapat menggambarkan pelaksanaan pengaturan kegiatan Pimpinan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan selama 1 Tahun	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan merupakan pelaksanaan pengaturan kegiatan Pimpinan Daerah yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan untuk mewujudkan terlaksananya pelayanan kegiatan pimpinan yang baik.

1.9.2. Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

• Penjelasan

Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan menggambarkan pelaksanaan kegiatan menghimpun dan mengolah informasi terkait kegiatan Pimpinan Daerah

Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain (a) belum optimalnya penyajian data dari perangkat daerah

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah Laporan hasil fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan menghimpun dan mengolah informasi terkait kegiatan Pimpinan Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang ditetapkan sebagai indikator kinerja merupakan dasar pengukuran yang dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan menghimpun dan mengolah informasi terkait kegiatan Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan selama 1 Tahun	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Dengan terlaksananya fasilitasi Komunikasi Pimpinan maka tersedianya himpunan informasi terkait kegiatan Pimpinan untuk mewujudkan terlaksananya pelayanan kegiatan pimpinan yang baik.

1.9.3. Terlaksananya Fasilitasi Dokumentasi Pimpinan

- **Penjelasan**

Terlaksananya Fasilitasi Dokumentasi Pimpinan menggambarkan pelaksanaan pengambilan, pengumpulan dan penyimpanan gambar dan informasi terkait kegiatan Pimpinan Daerah (a) Belum optimalnya sarana dan prasarana

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (1) Jumlah Laporan Hasil kegiatan fasilitasi Dokumentasi Pimpinan

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Dokumentasi Pimpinan	Dokumen Hasil Dokumentasi Pimpinan yang merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan pengambilan, pengumpulan dan penyimpanan gambar dan informasi terkait kegiatan Pimpinan Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Dokumentasi Pimpinan yang ditetapkan sebagai indikator kinerja merupakan dasar pengukuran yang dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan pengambilan, pengumpulan dan penyimpanan gambar dan informasi terkait kegiatan Pimpinan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Dokumentasi Pimpinan selama 1 tahun.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Dengan terlaksananya fasilitasi Komunikasi Pimpinan maka tersedianya kumpulan Dokumentasi terkait kegiatan Pimpinan untuk mewujudkan terlaksananya pelayanan kegiatan pimpinan yang baik.

Malili, Oktober 2024
Sekretaris Daerah

BAHRI SULI